

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia telah diciptakan oleh Tuhan yang mana terdiri dari dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, sudah pasti telah menjadi kodratnya bahwa diantara dua jenis itu untuk saling berpasangan dan membentuk sebuah keluarga, maka untuk memenuhi niat itu semua dapat disalurkan secara sah melalui ikatan perkawinan. Perkawinan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa).

Tuhan menciptakan keduanya dengan maksud untuk membuat sebuah keluarga sebagai pasangan suami isteri yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah. Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta

ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan akan sah apabila akad atau perjanjiannya telah terpenuhi. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa syarat-syarat dalam melakukan perkawinan itu yaitu:<sup>3</sup>

1. Syarat akad maksudnya yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip perkawinan. Syarat ini tersimpul dalam beberapa syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta yang terdapat dalam ijab qabul;
2. Syarat harus disempurnakan berdasarkan susunan akad. Jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap rusak; namun mayoritas ulama mengatakan batal, syarat ini mencakup sepuluh macam yakni dihalalkan pada waktu berikutnya seperti mengawini dua bersaudara setelah salah satunya meninggal, atau dihalalkan sejak awal seperti bagi yang bukan mahram; tidak dibatasi oleh waktu tertentu; ada saksi; keduanya sama-sama rela; jelas identitasnya; bukan ketika ihram; ada mahar; berakad tidak secara diam-diam; salah satu pihak tidak berpenyakit yang menyebabkan kematian; ada wali;
3. Syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditangguhkan. Persyaratan itu mencakup lima hal, yakni keduanya punya kewenangan bertindak untuk melakukan akad; suami bebas bertindak atas dirinya sendiri; harus ada penjelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh; jika berwakil, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakilkan; tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali;

---

<sup>1</sup> K.N Sofyan Hasan Warkam Sumitro, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional, hal 113.

<sup>2</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, hal. 10

<sup>3</sup> Prof. Dr. Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal.195-197

4. Syarat lazim, syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan perkawinan. Syarat ini mencakup tiga hal, yakni jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh saudara atau paman, atau dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasakh ketika halangan itu berlalu; kedua belah pihak harus setara; suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti pengibiran, impotensi dan sejenisnya.

Perkawinan dalam hukum islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat biasanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, misalnya calon mempelai pria atau wanita baru mengetahui dengan siapa mereka akan dikawinkan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Ada pula kasus, perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya pada saat telah melangsungkan perkawinan baru

diketahui bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan keluarga atau ternyata baru diketahui bahwa mempelai wanita sudah memiliki janin dari orang lain. Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara terinci tentang pembatalan perkawinan karena seorang wanita yang telah memiliki janin dari orang lain, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP ISTRI YANG TELAH MEMILIKI JANIN DARI ORANG LAIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah memiliki janin dari orang lain?
3. Apa akibat hukum yang timbul setelah pembatalan perkawinan diputus oleh Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembatalan perkawinan;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan;

- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama ilmu hukum dalam hal penyelesaian pembatalan perkawinan.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat di bidang hukum serta dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembatalan perkawinan.

##### **3. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata yang menyangkut mengenai pembatalan perkawinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian data adalah merupakan hal yang sangat penting, dimana diperlukan sebagai pembahasan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan dan mendapatkan data serta jawaban yang obyektif ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka

dibutuhkan metode-metode tertentu, adapun pengertian metode penelitian adalah tak lain daripada ‘cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’.<sup>4</sup>

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah tersebut adalah :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.<sup>5</sup> Penulisan penelitian ini mengenai penyelesaian pembatalan perkawinan terhadap istri yang telah memiliki janin dari orang lain di Pengadilan Agama Surakarta yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat agar tercipta suatu keteraturan hidup yang berdasarkan aturan hukum. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap penyelesaian pembatalan perkawinan terhadap istri yang telah memiliki janin dari orang lain.

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 97.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Hal. 60.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Maka dalam hal ini menggambarkan atau melukiskan mengenai Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain di Pengadilan Agama Surakarta.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data sekunder

Dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Yurisprudensi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. Hal. 57.



hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).**

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, website, dll.

b. Data primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari:

a) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta.

b) Subyek Penelitian

Yaitu sejumlah keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

## **F. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama

Surakarta atau mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.<sup>7</sup>

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung

---

<sup>7</sup> Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 30-31.

<sup>8</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal. 57.

jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

#### **G. Metode Analisis Data**

Karena penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif maka metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode analisis. Di dalam penelitian ini literatur yang ada hubungannya dengan Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain dipadukan dengan pendapat responden ( orang yang di wawancarai ) di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum terdiri atas 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** berisi tentang uraian tinjauan umum mengenai tentang Perkawinan, tinjauan umum mengenai Pembatalan Perkawinan, dan tinjauan umum mengenai Pemeriksaan Perkara Perdata.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** berisi tentang uraian Proses penyelesaian pembatalan perkawinan, Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah memiliki janin dari orang lain, dan Akibat hukum yang timbul setelah pembatalan perkawinan diputus oleh Hakim.

**BAB IV PENUTUP** berisi tentang kesimpulan dan saran